



Difabel Kesulitan Masuk Sekolah

SLEMAN—Sejumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) kesulitan mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri.

Uli Febriani & Hafit Yudi Suprobo
redaksi@harianjogja.com

Penyebabnya, hingga PPDB akan dilaksanakan mereka belum mendapatkan ijazah yang menjadi salah satu syarat administrasi PPDB.

Dwi Handayani, 51, orang tua siswa penyandang disabilitas asal Kulonprogo mengaku nilai Bahasa Indonesia anaknya sampai saat ini belum keluar. Padahal Rabu (3/7) merupakan hari terakhir pelaksanaan PPDB.

"Saya sudah tanya juga apakah KK [kartu keluarga] di luar kota bisa masuk mendaftar. Kalau memang tidak bisa saya akan pindah KK untuk mendaftar agar bisa sekolah," ujar Dwi Handayani di Kantor Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY, Selasa (2/7).

▶ Sekolah di DIY tidak boleh menolak siswa disabilitas dengan alasan apa pun.

▶ Budi Asrori menyebut sistem PPDB di Jogja telah mengakomodasi anak-anak yang berprestasi baik.

Dwi menjelaskan sebetulnya dia telah mendaftarkan anaknya ke salah satu SMP negeri di Kota Jogja melalui jalur zonasi tetapi disebut sudah telat.

Dia kemudian beralih melalui zonasi mutu. "Namun masuk zonasi mutu sampai habis masa waktu nilai UN belum keluar," katanya.

Dwi telah menanyakan nilai tersebut ke SLB sekolah asal tetapi diarahkan ke Dinas Pendidikan. Sesampai di dinas, Dwi belum juga mendapatkan jawaban.

Orang tua calon siswa lainnya, Rohma, 39, mengakui hal yang sama. Dia pun memutuskan langsung mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta, yakni di SMP Muhammadiyah 2 Depok, Sleman.

▶ Halaman 6

"Di sekolah negeri saya tidak mendapatkan informasi yang klar, tanya nilai ke dinas juga belum ada jawaban. Ya sudah akhirnya memantapkan diri di SMP swasta dan tidak mempersalahkan nilai itu, anak saya sudah diterima," jelas Rokana. Tapi saya juga tetap butuh ijazah anak dari sekolah asal," katanya.

Komisiner Bidang Permintaan dan Layanan Pengaduan Komite Disabilitas DIY, Winarta menilai permasalahan ini merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disedikpora) DIY yang membawahi SLR Winarta menyebutkan penyandang ditabel mempunyai hak atas pendidikan sesuai UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, sesuai Permendikbud No.51/2018 tentang PPDB, mendaftar di SD maupun SMP tidak menyaratkan nilai. "Di SMP ini kan harusnya dilabel enggak perlu menggunakan nilai. Yang mereka perlukan itu assessment, supaya bisa difasilitasi selama mengikuti pembelajaran di SMP yang bersangkutan," ujarnya.

Winarta juga menegaskan sekolah di DIY tidak boleh menolak siswa disabilitas dengan alasan apa pun. Hal tersebut mengacu deklarasi yang dilakukan Gubernur DIY pada 2014.

Kepala Disedikpora DIY Baskara Aji mengatakan tidak ada pengabaian yang dilakukan kepada ABK dalam proses PPDB 2019. "Tidak ada pengabaian. Itu harus keluar. Nanti saya tanya masalahnya apa," kata dia. Selasa.

Sebelum waktu pelaksanaan PPDB 2019 dimulai, kata dia, Disedikpora juga sudah mensyosialisasikan untuk anak-anak inklusi. "Ini dilakukan dua atau tiga hari sebelum pelaksanaan PPDB Reguler, maksimal dua orang [disabilitas] per rombongan belajar. Tergantung kelasnya. Jika ada lima kelas, berarti knotanya ada sepuluh anak," ujar Aji.

Terkait dengan pembatasan siswa disabilitas, Aji menjelaskan bagi mereka yang membutuhkan khusus tetapi tidak menemui hambatan di sekolah reguler. "Intinya supaya anak bisa itu keap belajar di sekolah reguler. Tuna rangu tidak masalah," ujar Aji.

Sekolah Favorit

Sejumlah orang tua peserta PPDB 2019 jenjang SMP di Kota Jogja menilai, istilah sekolah favorit belum layak dihapuskan, terlebih dikaitkan dengan sistem jalur zonasi wilayah.

Tejo, warga Pakualaman mengungkapkan adanya sekolah favorit dapat menciptakan iklim kompetisi bagi anak. Dengan menghapuskan sekolah favorit, pemerintah telah menghancurkan rasa kompetisi dalam diri anak. Sekolah memberikan anak-anak yang memiliki rumah bertekanan dengan sekolah favorit menjadi malas dalam belajar.

"Mereka jadi malas belajar, karena biar saja nilainya rendah, toh dengan zonasi pasti bisa masuk ke sekolah yang bagus. Seharusnya, walau rumahnya dekat, tetap diperhitungkan nilainya," ujarnya, Selasa.

Kepala Dinas Pendidikan Kota

Jogja, Budi Asrori menyebut sistem PPDB yang diterapkan Kota Jogja juga telah mengakomodasi anak-anak yang berprestasi baik. Kota Jogja menargetkan seluruh sekolah di Kota Jogja menjadi sekolah favorit, secara bertahap.

Terkait dengan pemerataan fasilitas, selama ini pemerintah memberikan bantuan yang hampir sama kepada setiap sekolah. Baik itu Bosas, Bosda, insentif GTT, honor guru, karyawan. "Standarnya sama," ucapnya.

Peraturan Presiden

Sistem zonasi sekolah bukan hanya garapan satu kementerian, tapi butuh sinkronisasi 18 kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Karena itu, dalam implementasinya butuh Peraturan Presiden (Perpres).

Pernyataan itu disampaikan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Mellana Cirsang saat diskusi *Di Balik Kebijakan Zonasi* di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, sistem zonasi dalam pendataan peserta didik baru (PPDB) sangat penting diperkuat Perpres sebagai dasar sinkronisasi kebijakan terkait sistem zonasi dengan K/L lain.

Dia mengatakan, di dalam Perpres itu akan diatur sinkronisasi dengan 18 K/L seperti Kementerian PUPR yang bertugas membangun sekolah, Kementerian Keuangan terkait dengan anggaran, Kementerian PAN dan RB untuk pemenuhan gurunya, dan bahkan ada Kementerian Agama yang membawahi sekolah keagamaan.

"Kami memandang zonasi sekolah itu bukan hanya kami. Tetapi perlu sinkronisasi, kolaborasi, dan sinergi antar K/L dan pemda," ungkap Chatarina.

Dia menuturkan nantinya Perpres mengatur tentang rotasi guru yang berdasarkan zonasi. Dengan zonasi, untuk menghitung kebutuhan guru per mata pelajaran akan lebih mudah. Apalagi, selama ini guru belum ada pemetaan secara akurat berapa kebutuhannya yang harus direkrut melalui CPNS. Lalu juga pembangunan sarana prasarana sekolah yang disinkronisasikan dengan zonasi.

Chatarina menjelaskan saat ini pemerintah tengah menyusun draft materi untuk Perpres yang rencananya akan dikeluarkan tahun ini. "Kami mengejar tahun ini harus keluar [perpres], dan itu kami akan libatkan K/L terkait," kata Chatarina.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan sistem zonasi pada PPDB memang butuh sinkronisasi jika mau sukses dalam pengimplementasiannya. Dia juga meminta adanya sinkronisasi dengan Kementerian terkait terkait dengan penerimaan mahasiswa baru yang jangan menyeleksi calon mahasiswa dari kategorisasi sekolahnya.

"Sinkronisasi juga harus di Kementerian terkait. Jangan sampai nanti penerimaan siswa baru masih gunakan jalur undangan yang terlalu banyak. Misalnya, sekolah unggulan

atau sekolah favorit banyak akhirnya membuat nilai-nilai seperti ini bertahap. Inilah maknanya butuh sinkronisasi kebijakan," katanya.

Hetifah menjelaskan bahan pembuatan kebijakan khususnya di bidang pendidikan memang harus berdasarkan data dan informasi akurat. Termasuk di dalamnya kebijakan tentang pembangunan sekolah baru, revitalisasi ruang kelas dan sarana prasarana, serta juga distribusi guru. Sementara agar tidak terjadi resistensi dan keluhan seperti yang terjadi di PPDB tahun ini, maka sinkronisasi kebijakan di pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat sejak dini.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Saedy menjelaskan sistem zonasi memang jangan menjadi tanggung jawab Kemendikbud saja. Dia menilai, melalui perpres maka semua K/L dan juga pemerintah daerah akan terlibat dalam pelaksanaannya. "Yang penting saat ini, yang terkait dengan misinformasi segera diselesaikan. Peta zonasi juga harus diselesaikan sehingga masyarakat tidak bingung tanpa harus mengubah sistem zonasi itu sendiri," ujarnya.

Saedy menuturkan, sistem zonasi mengurangi praktik jual beli kursi pada proses penerimaan siswa baru. Sebab, melalui zonasi maka siswa hanya bisa diterima melalui kedekatan jarak tempat tinggal dan sekolah.

Di sisi lain Saedy mengkritisi revisi kuota jalur prestasi di luar zona yang naik dari 5% ke 15%.

Menurut dia, semestinya revisi ini dibuat enam bulan sebelumnya, sehingga orang tua bisa लेकर nerka apakah prestasi anaknya itu bisa lolos syarat di sekolah yang dituju.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Reti Marinawati menyayangkan praktik PPDB melalui mekanisme zonasi sebesar 80% justru membuka ruang praktik manipulasi domisili. Pihaknya mendapatkan laporan bahwa ada orang tua murid yang memanipulasi domisili agar anaknya bisa masuk ke sekolah favorit.

"Kami mendapat informasi ada praktik manipulasi domisili demi mendapatkan sekolah favorit. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus menormasi praktik ini," kata Reti.

Menurut dia, praktik manipulasi domisili tentu diduga kuat terjadi pelanggaran hukum dengan memalsukan domisili. Karena itu, anggota legislatif dari Sukabumi ini meminta agar praktik curang tersebut harus diurus tuntas.

"Terkait dengan dugaan praktik manipulasi domisili, pemerintah harus melakukan investigasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum," desak Reti.

Selain itu, lanjut Wakil Ketua Dewan DPP PPP ini, persoalan di lapangan akibat penerapan PPDB dengan sistem zonasi ini harus menjadi catatan penting bagi Kemendikbud untuk memperbaiki. "Kami sepakat, ada masalah dalam penerapan sistem PPDB ini. Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya," ujarnya. *LHB/Wineng Zubaidah/Kawandar/Yogi Anugraha*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005